

Moratorium Hutan Rugikan Industri Sawit



dudud42.blogspot.com

JAKARTA – Pelaku industri kelapa sawit mengeluhkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai inpres tersebut sangat merugikan pelaku usaha serta petani.

"Pihak asing mendesak pemerintah untuk menandatangani letter of intent (LOI) dengan Norwegia yang salah satunya akan menerapkan moratorium konversi hutan. Hal tersebut sangat merugikan petani kelapa sawit karena pengembangan lahannya terbatas," kata Sekjen Apkasindo Asmar Arsyad pada Acara Diskusi Industri Sawit Pascamoratorium di Jakarta, Kamis (7/7).

Menurut Asmar, moratorium atau penghentian sementara dalam waktu dua tahun sangat menghambat pengembangan sawit. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya produksi benih kelapa sawit.

"Target produksi Crude Palm Oil (CPO) nasional sebesar 40 juta ton pada tahun 2020 dikhawatirkan tidak akan tercapai. Kebijakan moratorium memberi implikasi ketidakpastian usaha dan investasi di bidang sawit," kata Asmar.

Lebih lanjut, sebelum ada moratorium kelapa sawit, Indonesia memiliki 500.000 hektare lahan. Namun, dengan kebijakan tersebut, lahan kelapa sawit jumlahnya akan menyusut hanya sekitar 400 hektare.

"Moratorium membuat lahan kelapa sawit semakin sedikit. Saat ini, hanya ada 100 hektare lahan kelapa sawit pasca diberlakukannya moratorium pada 20 Mei 2011," tegas Asmar.

Di tempat yang sama, Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Maruli Gultom mengatakan industri sawit merupakan salah satu industri yang strategis bagi perekonomian di dalam negeri. Industri kelapa sawit adalah industri yang menyerap banyak tenaga kerja dan penyumbang devisa terbesar.

"Pelaku usaha mengharapkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri kelapa sawit. Untuk moratorium, pelaku usaha mendesak pemerintah untuk mengeluarkan payung hukum terkait pengembangan kelapa sawit nasional,"

Menurutnya, moratorium akan membuat harga crude palm oil (CPO) mengalami kenaikan. Selain itu, banyak masyarakat yang mengonsumsi produk turunan kelapa sawit.

"Moratorium menjadikan produk dari bahan baku kelapa sawit harga semakin tinggi. Hal ini tidak menguntungkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan pangan dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia," tutur Maruli.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan menyatakan Inpres Moratorium Konversi Hutan Primer dan Lahan Gambut tidak mengakomodasi semua aspirasi industri kelapa sawit karena dianggap diskriminatif sehingga membuka peluang terjadinya konflik baru.

"Inpres tersebut memberikan pengecualian kepada beberapa aktivitas ekonomi, yaitu geotermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta lahan untuk padi," kata Fadhil.